

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Partisipasi**

Partisipasi ditinjau secara etimologis, kata "partisipasi" berasal dari kata bahasa Inggris, *Participation*, yang memiliki arti bagian atau keikutsertaan (Yunita, L., 2021). Sementara itu, Dwiningrum (2011) mendefinisikan partisipasi sebagai pelibatan satu atau beberapa individu dalam suatu kegiatan atau aktivitas tertentu. *Rozen Berg* (Tjokrowinoto, 1984) didefinisikan sebagai keterlibatan mental dan emosional individu dalam suatu situasi kelompok. Keterlibatan ini bertujuan untuk mendorong kontribusi pemikiran demi tercapainya tujuan organisasi, sekaligus memicu rasa tanggung jawab bersama terhadap organisasi tersebut (Herjun, R. 2024).

Sementara *Cohen* dan *Hoff* (Dwiningrum, 2011) menjelaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan nyata individu dalam proses pembuatan keputusan. Keterlibatan ini mencakup penentuan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara pelaksanaan keputusan tersebut. Partisipasi berfungsi sebagai instrumen penting (alat) untuk memperoleh beragam informasi mengenai sikap, harapan, dan kebutuhan masyarakat, termasuk pengajuan usul mereka. Selain itu, partisipasi juga mewakili kehadiran masyarakat terlepas dari itu, pengembangan dan pelaksanaan pembangunan akan cenderung gagal atau tidak berhasil (Abdul, H. 2021).

Partisipasi masyarakat merupakan elemen integral (bagian yang tidak terpisahkan) dari proses pembangunan itu sendiri. Keterlibatan ini memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak dan kekuatan yang setara untuk menuntut manfaat yang dihasilkan dari pembangunan. Krina (2003) menjelaskan dalam

mewujudkan partisipasi ada beberapa aspek krusial yang perlu dipertimbangkan dalam mewujudkan partisipasi, aspek-aspek tersebut meliputi institusi konstitusional dan jaringan masyarakat sipil (*civil society*), serta kultur pemerintahan lokal. Selain itu, faktor-faktor pendukung lainnya seperti transparansi, akuntabilitas, dan kejujuran juga memegang peranan penting (Sumarto, H. S. 2025).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut melalui analisis sintesis dari berbagai pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan komprehensif yang meliputi aspek mental, emosi, dan fisik. Keterlibatan ini diwujudkan dalam penggunaan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam suatu kegiatan demi mendukung pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Dengan demikian, partisipasi masyarakat merupakan cerminan kepedulian dan kesadaran, baik secara individu maupun kelompok, untuk menyumbangkan pemikiran, tenaga, dan kemampuan demi kepentingan bersama, serta ikut bertanggung jawab atas setiap kesepakatan kolektif.

### **2.1.2 Partisipasi Politik**

Demokrasi memiliki hubungan yang berbanding lurus dengan tingkat partisipasi politik masyarakat. Semakin tinggi partisipasi politik yang ditunjukkan oleh masyarakat, maka kualitas dan kadar demokrasi suatu negara juga dinilai semakin tinggi (Lengkoan, I. C. J., dkk. 2022). Secara esensi, partisipasi politik merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas politik yang berlangsung dalam lingkup sistem negara demokrasi. Menurut Surbakti (1992), partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam penentuan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupannya. Sementara itu, pandangan lain mendefinisikan partisipasi politik sebagai aktivitas sukarela warga masyarakat yang melibatkan diri, baik dalam proses pemilihan pemegang kekuasaan maupun dalam perumusan dan pembentukan kebijakan publik secara

langsung atau tidak langsung (Naldi, A. A., 2024).

Partisipasi politik didefinisikan sebagai aktivitas warga negara yang dilakukan secara individual dengan tujuan memengaruhi proses pembuatan keputusan oleh pemerintah. Karakteristik partisipasi ini sangat beragam, yang meliputi tindakan yang bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, dilakukan secara damai atau dengan kekerasan, serta bisa bersifat legal atau ilegal, dan efektif atau tidak efektif (Vista, B., 2024). Sementara itu, menurut Surbakti (1992), partisipasi politik dapat dibagi menjadi dua jenis: partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencakup berbagai tindakan yang bertujuan langsung memengaruhi pemerintahan, seperti mengusulkan kebijakan publik, menyajikan alternatif kebijakan yang berbeda dari yang ditetapkan pemerintah, memberikan kritik konstruktif, serta melaksanakan kewajiban dasar seperti membayar pajak dan berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin. Sebaliknya, partisipasi pasif mencakup kegiatan-kegiatan yang sifatnya patuh dan menerima keputusan dari pemerintah. Bentuk keterlibatan ini terbatas pada menaati, menerima, dan melaksanakan setiap kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Firda, S., 2023).

Disamping itu, Aini, A. N. (2024), meskipun partisipasi politik sering dianggap sebagai hasil dari sosialisasi politik, penting untuk dicatat bahwa hubungan ini berlaku dua arah. Artinya, partisipasi politik itu sendiri juga memengaruhi proses sosialisasi politik. Kedua proses ini saling membutuhkan; tanpa adanya partisipasi politik, maka sosialisasi politik tidak akan dapat berjalan efektif atau optimal. Selanjutnya Norman (Tubagus, 2012) mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang sah (legal), kegiatan ini bertujuan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memengaruhi proses seleksi pejabat negara atau memengaruhi tindakan serta kebijakan

yang mereka ambil. Sejalan dengan itu, Sastroatmodjo (1995) merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok dalam kehidupan politik, keterlibatan ini diwujudkan melalui pemilihan pemimpin negara dan melalui upaya memengaruhi kebijakan publik (public policy) pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Lubis, 2022)

Disisi lain, Arbi Sanit (Sastroatmojo, 1995) memandang partisipasi politik memiliki tiga fungsi multidimensional yaitu: 1) Memberikan dukungan kepada penguasa dan sistem politik yang berjalan. 2) Sebagai upaya kontrol dengan menunjukkan kelemahan dan kekurangan pemerintah untuk mendorong perbaikan. 3) Sebagai bentuk tantangan atau perlawanan terhadap penguasa, yang bertujuan untuk menjatuhkan dan menciptakan perubahan struktural dalam sistem politik dan pemerintahan, sering kali melalui cara-cara ekstrem seperti kudeta, huru hara, atau pemogokan. Untuk mengukur partisipasi politik, menurut Fatwa (2016) indikator yang di gunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengikuti diskusi politik
- 2) Mengikuti kampanye politik
- 3) Menggunakan hak suara di TPS

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut melalui analisis sintesis dapat disimpulkan bahwa, partisipasi politik dapat dijelaskan sebagai keterlibatan masyarakat dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti mengikuti diskusi politik, mengikuti kampanye politik, menggunakan hak suara di TPS.

### 2.1.3 Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi dapat diamati dari perilaku yang saat ini terjadi di masyarakat. Partisipasi tersebut secara umum berbentuk yang dapat diamati secara seksama, sebagai contoh nilai mata uang, keahlian yang dimiliki, dan benda. Adapun partisipasi yang tidak dapat dilihat secara langsung adalah dimana hasil dari infiltrasi pemikiran masyarakat yang dimana mewakili dari hasil kebijakan publik. Model partisipasi politik terbagi kedalam beberapa bentuk antara lain adalah: Kegiatan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Lobbying, Kegiatan organisasi politik. Kontak dengan pejabat pemerintah pembuat dan pelaksana keputusan dan memengaruhi proses politik dengan kekerasan (Elly dan Usman, 2013). Dalam pendapat tokoh bernama Tur Wahyudin beliau memisahkan partisipasi kedalam berbagai jenis yaitu:

a. Masyarakat dalam kondisi Primitif / kurang pemahaman

Kondisi tersebut menjadikan adanya partisipasi sangat baik, dengan jumlah yang signifikan, sehingga kita merasa susah membedakan.

b. Masyarakat dalam proses berkembang

Memiliki pengaruh dan ketaatan yang sangat besar, sehingga golput rendah Masyarakat dalam kondisi ini memiliki karakteristik campuran dari pemahaman tradisional ke pasca modern, sehingga pemahaman mereka menjadikan lemah

c. Masyarakat yang memiliki sifat totaliter,

Karakteristik satu ini adalah unik, dan memegang peran besar dalam pengontrolan proses politik, untuk mengetahui seberapa besar partisipasi dalam masyarakat, Amstein pula menawarkan suatu teori yang disebut dengan teori The Ladder of Participation yaitu suatu gradasi atau pentahapan partisipasi masyarakat. Ia membagi partisipasi menjadi

delapan tahap sebagai berikut:

- a. Manipulasi (*Manipulation*): Partisipasi semu di mana warga hanya digunakan untuk mendukung tujuan pemerintah/pengelola.
- b. Terapi (*Therapy*): Fokus pada penyembuhan atau penyadaran warga agar menerima keputusan, bukan partisipasi nyata.
- c. Informasi (*Informing*): Tahap satu arah, warga hanya diberi tahu hak dan tanggung jawabnya.
- d. Konsultasi (*Consultation*): Warga dimintai pendapat, tetapi tidak ada jaminan pandangan mereka akan dipertimbangkan.
- e. Penenangan (*Placation*): Warga mulai diikutsertakan, namun pemegang kekuasaan masih dominan dalam keputusan akhir.
- f. Kemitraan (*Partnership*): Kekuasaan didistribusikan melalui negosiasi antara warga dan pemegang kekuasaan.
- g. Kekuasaan yang didelegasikan: (*Delegated Power*): Warga memiliki suara mayoritas dalam pengambilan keputusan.
- h. Kontrol Warga (*Citizen Control*): Tahap tertinggi, warga mengelola program dan mengambil keputusan penuh.

Kedelapan tahap ini merupakan alat analisis untuk mengidentifikasi partisipasi masyarakat.

Jika mengacu dalam pendapat diatas, terkait dengan partisipasi politik menurut Amstein yang dimana menggambarkan anatomi secara detail terkait tahapan atau skema jalur partisipasi ditengah kondisi lapangan masyarakat. Adapun beberapa tahapan yang

di jelaskan sebagai berikut:

- a. Kegiatan memanipulasi atau dapat dikatakan sebagai bentuk penyimpangan, akan tetapi masuk dalam tahap 2 terdapat proses perbaikan yang dimana konsep sebenarnya.
- b. Tangga ketiga dimana memberikan pemahaman terkait proses partisipasi politik, selain itu keberlanjutan tangga selanjutnya pada tangga ke empat dimana lebih ditekankan pada proses konsultasi, hingga ke tangga lima ditekankan pada penyelesaian permasalahan yang ada.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum dikenal adalah pemungutan suara (voting) entah untuk memilih calon wakil rakyat atau untuk memilih kepala negara. Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif.

Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan- peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk- bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran

untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasaan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Berdasarkan buku Perbandingan Sistem Politik, membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu: (Gabriel, 2008).

- a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik non konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat ada tabel berikut.

**Tabel 2.1. Bentuk-bentuk partisipasi politik**

<b>KONVENSIONAL</b>	<b>NON KOVENSIONAL</b>
1. Pemberian suara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	1. Pengajuan petisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) 7. Perang grilya dan revolusi

*Sumber: Buku Perbandingan Sistem Politik Gabriel Almond*

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik.

Selanjutnya Micheal Rush dan Philip Althoff mengajun hierarki partisipasi politik sebagai tipologi politik. Herarki tertinggi dari partisipasi adalah menduduki jabatan politik administratif. Sedangkan herarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apatis secara total atau orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh bagan Herarki Partisipasi Politik dimana garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

**Gambar 2.1. Herarki Partisipasi Politik Michael Rush dan Philip Althoff**



Berdasarkan beberapa pendapat tersebut melalui analisis sintesis dari berbagai pendapat yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik suatu sistem dengan tujuan memengaruhi hasil keputusan publik. Bentuk-bentuk partisipasi ini umumnya diklasifikasikan berdasarkan dua dimensi utama, perilaku dan intensitas.

## **2.2 Kerangka Teoretis**

Kerangka pemikiran didefinisikan sebagai model konseptual yang menjelaskan keterkaitan antara suatu teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penelitian yang penting (Sugiyono, 2023). Dalam konteks penelitian, kerangka pemikiran berfungsi sebagai batasan kajian untuk memastikan hasil penelitian tetap jelas, terarah, dan tidak menyimpang dari fokus pembahasan utama. Berdasarkan tinjauan kajian teori yang telah dipaparkan, penelitian ini akan menyusun kerangka teoritis dengan fokus pada Analisis Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik dalam Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 di Desa Kawali Kecamatan Kawali.

Secara umum, Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara dimana mereka berada pada negara demokrasi, demikian pula dengan masyarakat Desa Kawali, kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, sebagai warga negara yang mendukung proses demokrasi dan pembangunan negara. Masyarakat berhak memiliki hak dan tanggung jawabnya masing masing. Secara esensi, partisipasi politik merupakan wujud keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas politik yang berlangsung dalam lingkup sistem negara demokrasi. Menurut Surbakti (1992), partisipasi politik adalah bentuk keikutsertaan warga negara dalam penentuan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupannya. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang

dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.

Partisipasi politik menurut Michael Rush dan Philip Althof disajikan dalam bentuk hierarki atau piramida, di mana bentuk-bentuk keterlibatan warga diklasifikasikan berdasarkan intensitas, sumber daya, dan jumlah partisipan yang terlibat; semakin tinggi tingkatannya, semakin kecil kuantitas orang yang berada di dalamnya. Pada puncak hierarki terletak bentuk partisipasi elite, yaitu Menduduki jabatan politik atau administratif dan Mencari jabatan politik atau administratif, yang merepresentasikan tingkat tertinggi dalam kekuasaan pengambilan keputusan. Tingkat di bawahnya adalah partisipasi yang terorganisir, mencakup Keanggotaan aktif suatu organisasi politik, diikuti oleh Keanggotaan pasif suatu organisasi politik, serta Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik dan Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik, yang memerlukan komitmen formal meskipun intensitasnya berbeda. Selanjutnya, partisipasi massa yang lebih terbuka melibatkan Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dsb. sebagai bentuk mobilisasi publik. Bentuk yang lebih kognitif dan informal adalah Partisipasi dalam diskusi politik informal minat umum dalam politik. Terakhir, di dasar hierarki dan menjadi bentuk yang paling umum serta membutuhkan komitmen paling minimal adalah Voting (pemungutan suara), yang mencerminkan partisipasi pasif konvensional. Hierarki ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menganalisis spektrum penuh keterlibatan politik, mulai dari apatis total hingga elite pengambil keputusan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mencoba menggambarkan kerangka pemikiran mengenai “Analisis Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik dalam Pilkada Kabupaten Ciamis tahun 2024 di Desa Kawali Kecamatan Kawali”.

**Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran**